

**PUTUSAN PEMIDANAAN YANG HANYA DIDASARKAN PADA 1
(SATU) ALAT BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

Marcella Suwignjo

Hukum/Ilmu Hukum

Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum

Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas putusan pidana yang hanya didasarkan pada 1 (satu) alat bukti dalam perkara tindak pidana narkoba. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam putusan nomor register: 1568/Pid.Sus/2016, terdakwa MS diputus hanya berdasarkan satu alat bukti yaitu keterangan saksi. Putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa minimal harus ada dua alat bukti dan keyakinan hakim. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa MS harus diputus bebas karena putusan tersebut tidak sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia yaitu, pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Penjatuhan putusan pidana harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai dengan Pasal 183 KUHP sehingga apabila putusan tersebut tidak memiliki pembuktian yang cukup maka terdakwa harus diputus bebas.

Kata Kunci: Penjatuhan pidana, alat bukti, sistem pembuktian secara negatif, Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika, Pasal 183 KUHP

CONVICTION VERDICT THAT IS ONLY BASED ON 1 (ONE) EVIDENCE IN THE CASE OF NARCOTICS CRIME

Marcella Suwignjo

Law/Legal Sciences

Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum

Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

ABSTRACT

Abstract– This study discusses conviction verdict that is only based on 1 (one) evidence in the case of narcotics crime. Research method used in this study is juridicial normative research. In the verdict with registration number: 1568/Pid.Sus/2016, defendant MS is accused only based on one evidence which is witness' statement. The judge's decision is not compatible with Article 183 Criminal Code Procedures that regulate the decision of whether a defendant is guilty or not should have at least 2 evidences and judge's belief. From the analysis' result, conclusion obtained is that defendant MS must have been exempted because the decision made was not compatible with the verification's system adopted in Indonesia, which is, proofs based on negative statute. Verification system on negative statute is based on statue's valid evidence and judge's belief. The conviction must be at least 2 evidences based on Article 183 Criminal Code Procedures. So if the decision does not have enough evidences, defendant must be set free.

Keywords: Criminal Imprisonment, evidence, system on negative statute, Article 114 section 2 of Narcotics Act, Article 183 Criminal Code Procedures.